RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan memperhatikan:

(a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
(b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022;
(c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
(d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
(e) kebijakan nasional;
(f) regulasi yang berlaku; dan
(g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

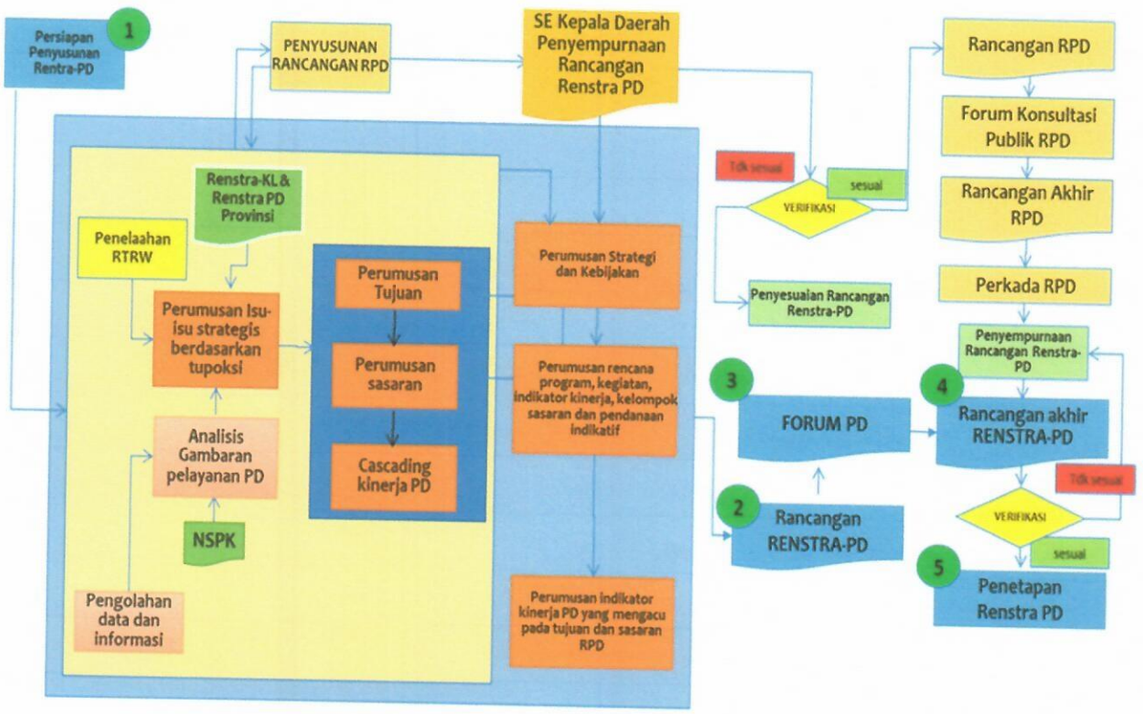
Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi:

(1) persiapan penyusunan;
(2) penyusunan rancangan;
(3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
(4) perumusan rancangan akhir; dan
(5) penetapan Renstra PD,

dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, dan Renja Dinas Perhubungan adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi. Kemudian Renstra Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Perhubungan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Dinas Perhubungan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perhubunga , serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya;
2.3. Kinerja Pelayanan;
2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
2.5. Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan;
2.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan;
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
3.1. Permasalahan Pelayanan;
3.2. Isu Strategis;
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan;
4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Dinas Perhubungan, serta Peta Proses Bisnis;
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU).
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk,Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan.

Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang perhubungan;
b. pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perhubungan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan kooordinasi antar Badan/Kantor/Dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan;
e. pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perhubungan;
f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI



- **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perhubungan.

- **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
h. pelaksanaanfasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah
i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;

6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten serta pembinaan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di jalan kabupaten serta pembinaan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten;
b. penyiapan perencanaan kebutuhan dan penempatan kelengkapan jalan di jalan Kabupaten;
c. penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Teknik Sarana dan Prasarana**

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, program kerja dan kebijakan teknis di bidang perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi.

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis tentang fasilitas perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
b. penetapan rencana dan program kerja di bidang teknik sarana prasarana;

c. pelaksanaan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Angkutan dan Transportasi**

Bidang Angkutan dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan transportasi.

Bidang Angkutan dan Transportasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang angkutan dan transportasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan transportasi;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
e. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan dan transportasi;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Kelas B).**

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor meliputi persyaratan teknis

kendaraan bermotor, pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan pemberian tanda lulus uji kendaraan bermotor.

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ;
d. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian
e. Pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
f. Pengelolaan keamanan dan kebersihan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- **UPTD Terminal Tipe C (Kelas B).**

UPTD Terminal Tipe C mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis untuk melakukan pelayanan jasa transportasi ,meliputi pelaksanaan teknis kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan atas kenyamanan penumpang kendaraan umum sesuai dengan rute jalur pelayanan.

UPTD Terminal Tipe C mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional terminal ;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian unit terminal Tipe C ;
c. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja/dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
d. pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan terminal ;
e. pengelolaan keamanan, ketertiban terminal dan kebersihan terminal ;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan terminal.

Berikut jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk (per JANUARI 2023)

No.	Kepala Dinas/Bidang/Subag/Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk	1
2.	Sekretaris	
	- Sub. Umum Dan Kepegawaian	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	1
	- Pelaksana	8
	Jumlah	**11**
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	3
	- Pelaksana	5
	Jumlah	**9**
5.	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	3
	- Pelaksana	8
	Jumlah	**12**
4.	Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	2
	- Pelaksana	4
	Jumlah	**7**
7.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	0
	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	- Tenaga Penguji	4
	- Tenaga Pelaksana	7
	Jumlah	**11**
8.	UPT Terminal Tipe C	15
	Jumlah	**15**
	Jumlah Keseluruhan	**65**

2.2 SUMBER DAYA

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memiliki sumber daya manusia (Tahun 2023) sejumlah 65 orang ASN dengan berbagai kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan adalah:

1.	SD	=	1 Orang
2.	SMP	=	6 Orang
3.	SMA	=	29 Orang
4.	Diploma 2	=	0 Orang
5.	Diploma 3	=	2 Orang
6.	S1	=	22 Orang
7.	S2	=	5 Orang
	JUMLAH	=	**65 Orang**

b. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan adalah:

1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	0 Orang
3.	Pembina (IV/a)	=	3 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	=	11 Orang
5.	Penata (III/c)	=	10 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	=	2 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	=	7 Orang
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	=	14 Orang
9.	Pengatur (II/c)	=	9 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	=	4 Orang
11.	Pengatur Muda (II/a)	=	2 Orang
12.	Juru Tingkat I (I/d)	=	2 Orang
13.	Juru (I/c)	=	Orang
14.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	=	- Orang
15.	Juru Muda (I/a)	=	- Orang
	JUMLAH	=	**65** Orang

Disamping pendidikan penjenjangan, aparatur Dinas Perhubungan juga mengikut sertakan berbagai pendidikan dan latihan teknis/fungsional (bidang pelayanan, PKB, LLAJ), mengikuti berbagai seminar, simposium, dan rapat-rapat koordinasi tingkat Propinsi maupun Nasional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan telah tersedia sarana dan prasarana meliputi:

Sarana :

- Kendaraan roda empat : 5 Unit
- Bus Sekolah : 3 Unit
- Skylift : 3 Unit
- Kendaraan roda dua : 18 Unit
- Komputer : 21 Unit
- Laptop : 12 Unit

Prasarana :

- Gedung Kantor Dishub : 1 Unit
- Gedung PKB : 1 Unit
- Terminal MPU dan Area Parkir Khusus Truck Guyangan :6 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dinas Perhubungan hadir dalam rangka memberikan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pelayanan sektor transportasi meliputi pelayanan dalam memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan meliputi Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Terminal dan Halte, Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Pelayanan berupa kegiatan menjaga Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas:

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan kebijakan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah ini akan disetor ke kas daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk melayani masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk meliputi Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan dan Penumpang dan Bus Umum, Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal,Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Hasil Sewa BMD.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah sangat besar pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah setiap tahunnya. Rata-rata ratio realisasi dan anggaran PAD mencapai nilai di atas 100. Hal ini menggambarkan bahwa efektifitas kinerja PAD mulai tahun 2018–2022 berjalan efektifit karena dikatakan efektif jika menacapai nilai di atas 100%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, realisasi PAD setiap tahun mendekati target bahkan melebihi target,dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

PENERIMAAN ASLI DAERAH APBD 2018 - 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	URAIAN	2018			2019			2020			2021			2022		
		Target	Penerimaan	Capaian	Target	Penerimaan	Capaian	Target	Penerimaan	Capaian	Target	Penerimaan	Capaian	Target	Penerimaan	Capaian
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.909.779.000	6.154.260.000	104,14%	6.254.321.000	6.371.000.000	101,87%	6.560.848.000	6.239.098.000	95,10%	6.560.848.000	6.210.513.500	94,66%	6.240.975.000	6.295.852.000	100,88%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	472.966.000	533.531.850	112,81%	1.100.000.000	1.068.122.850	97,10%	1.000.055.000	997.536.394	99,75%	1.000.055.000	1.059.727.395	105,97%	1.000.100.000	1.000.895.000	100,08%
3	Retribusi Terminal	145.548.240	142.147.740	97,66%	164.385.240	159.968.240	97,31%	153.343.240	155.550.740	101,44%	153.288.240	155.520.640	101,46%	154.325.800	155.761.700	100,93%
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	98.997.000	103.161.000	104,21%	25.902.000	27.101.000	104,63%	25.902.000	26.890.000	103,81%	25.902.000	27.567.000	106,43%	26.000.000	27.808.000	106,95%
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-		-	-		5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	3.200.000	64,00%	-	-	
	JUMLAH	6.627.290.240	6.933.100.590	104,61%	7.544.608.240	7.626.192.090	101,08%	7.745.148.240	7.424.075.134	95,85%	7.745.093.240	7.456.528.535	96,27%	7.421.400.800	7.480.316.700	100,79%

2.3.2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang. Rata-rata kendaraan dilayani sebanyak 40 unit perhari. Waktu pelayanan 30 menit terdiri dari 20 menit pelayanan uji dan 10 menit untuk keperluan dokumen. Jumlah penguji 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Penyelia 3 orang
- Pelaksana lanjutan 2 orang
- Pelaksana 3 orang
- Pelaksana Pemula 1 orang

Adapun jenis, jumlah serta kualitas alat uji adalah sebagai berikut :

No	Alat Uji	Kondisi	Kalibrasi Terakhir
1	*Carlift/pitlift*	Berfungsi	-
2	*Wheel Suspension Tester*	Berfungsi	-
3	*Axle Load Tester*	Berfungsi	November 2022
4	*Brake Tester*	Berfungsi	November 2022
5	*Side Slip Tester*	Berfungsi	November 2022
6	*Speedometer Tester*	Berfungsi	November 2022
7	*Head Light Tester*	Berfungsi	November 2022
8	*CO/HC Tester*	Berfungsi	November 2022
9	*Smoke Tester*	Berfungsi	November 2022
10	*Sound Level Tester*	Berfungsi	November 2022
11	*Light Meter*	Berfungsi	November 2022
12	*Compressor*	Berfungsi	November 2022
13	*Generator Set*	Berfungsi	November 2022
14	*Tint Tester*	Berfungsi	November 2022

Sumber:UPT PKB Kabupaten Nganjuk

Jumlah kendaraan laik jalan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan pada renstra periode 2014-2018 dan merupakan IKK pada Renstra Periode 2018 - 2023. Adapun jumlah kendaraan wajib uji dan kendaraan lulus uji sampai dengan bulan Desember 2022 serta capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Wajib Uji	Jumlah Lulus Uji	Capaian Kinerja
2015	15.161	13.236	83,92
2016	16.119	14.070	86,87
2017	16.213	14.176	87,44
2018	15.812	14.328	90,62
2019	15.330	14.422	94,08
2020	15.364	15.110	98,35
2021	14.842	14.525	97,86%
2022	13.698	13.474	98,36%

Sumber:UPT PKB Kabupaten Nganjuk

2.3.3. Pelayanan Terminal dan Halte

Terminal dan Halte merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Terminal merupakan simpul dari jaringan trayek angkutan umum. Keberadaan terminal sangat penting dalam melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam hal pengelolaan terminal adalah mengelola Terminal Tipe C. Terdapat 5 unit Terminal Tipe C di Kabupaten Nganjuk diantaranya sebagai berikut :

a. Terminal Tipe C Nganjuk
b. Terminal Tipe C Sawahan
c. Terminal Tipe C Berbek
d. Terminal Tipe C Gondang
e. Terminal Tipe C Warujayeng

Selain sebagai simpul jaringan trayek dalam memberikan pelayanan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum, Terminal Tipe C juga merupakan unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retibusi Terminal. Retribusi dikenakan kepada Angkutan Umum yang masuk dan menggunakan fasilitas di dalam terminal.

Halte berfungsi sebagai lokasi naik dan turun penumpang angkutan umum pada lokasi telah ditentukan. Halte sangat bermanfaat bagi

calon penumpang karena memberikan kenyamanan saat menunggu kedatangan angkutan umum. Halte di Kabupaten Nganjuk sejumlah 35 unit tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA HALTE	LOKASI
	KECAMATAN NGANJUK	
1	HALTE BEGADUNG 1	- simpang 4 ring road (arah Bojonegoro)
2	HALTE BEGADUNG 2	- simpang 4 ring road sisi utara (arah Surabaya)
3	HALTE WERUNGOTOK 1	- Simpang 4 Werungotok (sisi utara)
4	HALTE WERUNGOTOK 2	- Simpang 4 Werungotok (sisi selatan)
5	HALTE SMA 2	- Utara SMU 2 Nganjuk
6	HALTE BALAI BUDAYA	- Utara Balai Budaya Nganjuk (Jl. Veteran)
7	HALTE JALAN MASTRIP	- Selatan simpang 4 mastrip
8	HALTE NGANJUK	- Depan Tempat Pemotongan Hewan
9	HALTE NGANJUK	- Depan SMP Nganjuk
	KECAMATAN LOCERET	
10	HALTE CANDI	- Depan Perumnas Candi
11	HALTE LOCERET 1	- Depan Kecamatan Loceret (sisi selatan)
12	HALTE LOCERET 2	- Depan kantor Desa Patihan (sisi selatan)
13	HALTE LOCERET 3	- Depan SMPN 1 LOCERET (sisi utara)
	KECAMATAN WILANGAN	
14	HALTE AWAR-AWAR 1	- Simpang 4 Awar awar (sisi utara)
15	HALTE AWAR-AWAR 2	- Simpang 4 Awar awar (sisi selatan)
16	HALTE SUDIMOROHARJO	- Arah Sudimoro harjo wilangan
17	HALTE NGADIPIRO	- Depan Kantor Desa Ngandipiro Wilangan
18	HALTE WILANGAN (SISI SELATAN)	- Depan SD Wilangan I
	KECAMATAN PACE	
19	HALTE PACE	- Depan kantor Kecamatan Pace
20	HALTE DS. JOHO PACE	- Depan SDN Joho Pace
21	HALTE POLSEK PACE	- Barat Traffic Light Pacekulon
	KECAMATAN BARON	
22	HALTE BARON	- Simpang 4 Baron pasar (sisi selatan)

NO	NAMA HALTE	LOKASI
23	HALTE BARON	- Depan Stasiun Baron
	KECAMATAN TANJUNG ANOM	
24	HALTE NGRAJEK 1	- Simpang 4 Desa Ngrajek (sisi utara)
25	HALTE NGRAJEK 2	- Simpang 4 Desa Ngrajek (sisi selatan)
	KECAMATAN REJOSO	
26	HALTE REJOSO	- Simpang 4 Pasar Rejoso (sebelah kantor KecamatanRejoso)
	KECAMATAN JATIKALEN	
27	HALTE JATIKALEN	- Ds. Munung Kec. Jatikalen
	KECAMATAN BAGOR	
28	HALTE PASAR BAGOR UTARA	- Depan kantor kecamatan Bagor
29	HALTE BAGOR	- Depan SMK Bagor
30	HALTE BAGOR	- Selatan Jalan Raya
	KECAMATAN PATINROWO	
31	HALTE PATIANROWO	- Depan SMA Patianrowo
	KECAMATAN SAWAHAN	
32	HALTE SMPN 1 SAWAHAN	- Depan SMPN 1 Sawahan
	KECAMATAN BERBEK	
33	HALTE BERBEK	- Depan Puskesmas Berbek
	KECAMATAN SUKOMORO	
34	HALTE LOTUS	- Depan PT. Lotus

2.3.4. Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan merupakan prasarana yang berfungsi untuk menciptakan lalu lintas yang lancar dan mencegah terjadinya kecelakaan. Perlengkapan jalan akan mengarahkan dan menuntun pengguna jalan sehingga ketertiban lalu lintas akan terjaga. Sampai dengan tahun 2022, jumlah perlengkapan jalan yang telah tersedia adalah sebagai berikut :

Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2019 - 2022

No.	Perlengkapan Jalan	Jumlah Awal Tahun	Jumlah Pengadaan Tahun				Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Rambu-rambu lalu lintas	1936	223	0	134	13	2306 Unit
2	Guardrail	78	0	1	1	0	80 Lokasi
3	APILL	149	6	4	2	0	161 Unit
4	Cermin Tikungan	12	0	0	0	0	12 Unit
5	Marka	0	0	151,3 M²	745,98 M²	1330,3 M²	2227,58 M²
6	Traffic cone	0	0	0	100	0	100 Unit
7	Deliniator	305	200	0	0	0	505 Unit
8	Paku jalan bulat	380	0	0	0	0	380 Unit
9	PJU	4691	193	450	147	39	5520 Unit
10	Concret barrier	0	0	0	50	0	50 Unit
11	Pengadaan CCTV	2	2	0	0	0	4 Unit
12	Pengadaan ZOSS	6	0	0	0	0	6 Unit
13	Zebra cross						
14	Rambu elektronik	0	0	0	0	0	0
15	Pengadaan PCTL	0	2	0	0	0	2 Unit

2.3.5. Pelayanan Bidang Angkutan

Pelayana Dalam Bidang Angkutan diwujudkan Dinas Perhubungan dengan berbagai bentuk kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Angkutan Sekolah Gratis merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar. Guna Mengurangi kemacetan pada kawasan pendidikan di jam-jam sibuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya banyak terjadi pada pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah. Sekolah Gratis yang saat ini berjalan dan baru mengakomodir 1 (satu) rute dengan titik pemberangkatan dari JOHO Pace dan Titik Akhir SMAN 3 Nganjuk Jumlah siswa yang terlayani sebanyak 90 anak / Pulang – Pergi. Rencana Program Pelaksanaan kegiatan untuk dapat memenuhi sampai 15 (Lima Belas) Rute Angkutan Sekolah Gratis di wilayah Kabupaten Nganjuk.
2. Angkutan Khusus Disabilitas yang saat ini baru tersedia untuk 1 Sekolahan Khusus Disabilitas dengan rute Dari Terminal MPU Sawahan – SLB KRIDA UTAMA 2 Loceret, dengan jumlah siswa terlayani 32 anak / Pergi – Pulang.
3. Angkutan Mudik dan Balik Gratis untuk Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Bekerja di luar Kabupaten terutama di Kota Surabaya dan sekitarnya. Program yang selama ini bejalan baru mampu menyediakan untuk balik gratis tujuan Nganjuk ke Surabaya dengan jumlah Armada sebanyak 2 Bus dengan jumlah terlayani 120 orang. Perencaan kegiatan untuk penyediaan Angkutan Mudik dan Balik gratis dengan Armada yang mencukupi kebutuhan sehingga memudahkan masyarakat saat angkutan lebaran.
4. Pelaksanaan Abdi Yasa Teladan untuk memdudukkan insan pengemudi angkutan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan terhadap profesinya.
5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik untuk pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan untuk meningkatkan

profesionalisme pelayanan dan ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jasa angkutan.

2.3.6. Pelayanan Kegiatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas

Pelayanan dalam ketertiban dan keamanan lalu lintas diwujudkan Dinas Perhubungan dengan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait diantaranya Kepolisian Resort Nganjuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan instansi lainnya.Kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi keselamatan lalu lintas anak usia dini

   Dalam rangka memberikan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak, Dinas Perhubungan Kab Nganjuk bersinergi dengan Polres Nganjuk melaksanakan Sosialisasi ini untuk menanamkan pengetahuan dan menumbuhkan perilaku tertib ber lalu lintas sejak dini. Dengan harapan anak-anak memahami tata cara berlalu lintas lintas dengan baik, mengenal rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di masa datang. Pada gilirannya nanti, saat mereka dewasa mereka mampu mengendarai motor/mobil dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah diketahui/dipahami serta berlalu lintas dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.

2. Pengamanan lalu lintas dalam rangka hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk.

   Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk Dinas Perhubungan menerjunkan personil atau petugas untuk berjaga di Ruas-ruas jalan untuk tetap menjaga Ketertiban, Keamanan dan mengatur Kelancaran Berlalulintas.

3. Sosialisai keselamatan bagi pengusaha angkutan umum orang dan barang.

   Untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan angkutan umum dan barang maka perlu adanya sosialisasi Pentingnya Etika Berlalu Lintas di Jalan. Pengertian sederhana Etika

berlalu lintas adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguana jalan khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Tata cara berlalu lintas adalah bagaimana perilaku masyarakat pengguan jalan dalam berlalu lintas selalu menaati peraturan lalu lintas sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga masyarakat selama berlalu lintas dijalan dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas serta terhindar dari bentuk pelanggaran dan kecelakaan

Dari program dan kegiatan yang ada di OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Pada prinsipnya beberapa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan harapan namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannnya baik dari segi penyerapan anggaran maupun implementasi kegiatan. Berikut kami tampilkan tabel pencapaian kinerja dan progress rata-rata pagu maupun realisasi anggaran pada masing-masing Program.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas				5%	10%	10%	12%	15%	2,29%	7,81%	32,71%	20,19%		45,80%	78,10%	327,10%	168,25%	
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standard perlengkapan jalan				21%	22%	23%	24%	25%	20,85%	21,28%	22,77%	24,04%		99,29%	96,73%	99,00%	100,17%	
3	Persentase Prasarana Transportasi Darat yang memadai				84%	88%	93%	95%	100%	83,72%	88,37%	93%	95,35%		99,67%	100,42%	100%	100,37%	

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke- (%)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.068.389.300	13.405.553.950			15.610.661.186	12.938.706.879			97,15	96,52		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.225.000.000	1.043.500.000			1.180.853.557	1.035.841.816			96,40	99,27		
Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000	4.800.000			29.330.000	4.000.000			97,77	83,33		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.000.000	23.380.500			9.854.000	21.633.000			61,59	92,53		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	110.000.000	-			100.407.000	-			91,28	-		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	847.928.000	-			831.866.579	-			98,11	-		
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.350.120.000	589.380.900			1.191.918.580	283.461.275			88,28	48,09		
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	260.000.000	-			257.272.500	-			98,95	-		
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	699.800.000	453.032.500			669.134.200	438.937.000			95,62	96,89		
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.398.512.000	3.033.174.000			2.354.879.726	2.969.068.900			98,18	97,89		
Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	2.640.000.000	2.640.000.000			2.583.573.393	10.113.890.206			97,86	99,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.209.743.050	27.959.857.708			20.58.4799.974	24.175.019.863			92.68	86.46%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			7.792.305.718	7.173.039.350			7.457.119.322	6.741.853.245,24			95.69	93.99%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sesuai dengan tabel 2.2 diatas secara keseluruhan pelaksanaan program urusan perhubungan sudah terserap hampir 100% dengan predikat sangat tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa program dan kegiatan sudah terdistribusikan secarap optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu pekerjaan yang efisien dan efektif menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh tujuan dan sasaran dari OPD dapat terwujud dengan tetap memegang prinsip-prinsip pada good and clean governance. Sebagai tindak lanjut atas hasil capaian indikator kinerja utama dan serapan anggaran pada empat tahun terakhir, maka review atas penilaian tersebut dijadikan sebagai landasan atas perencanaan strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026.

Pelaksanaan urusan Perhubungan sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, pelayanan tersebut berupa pemenuhan prasarana keselamatan transportasi. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikaitkan dengan kedua komponen pelayanan tersebut. Adapun evaluasi indikator urusan perhubungan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

  Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan Dinas Perhubungan dalam rangka menciptakan transportasi di Kabupaten Nganjuk yang aman, selamat dan tertib.

Target kinerja indikator sebesar 12% dan terealisasi 20,19% sehingga capaian kinerjanya sebesar 168,25%.

- Persentase ruas jalan yang memenuhi standard perlengkapan jalan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan Dinas Perhubungan dalam rangka menciptakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan

  Target kinerja indikator sebesar 24% dan terealisasi 24,04% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,17%.

- Persentase Prasarana Transportasi Darat yang memadai adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan Dinas Perhubungan dalam rangka menyediakan fasilitas bagi pengguna angkutan umum. Prasarana transportasi yang menjadi penilaian adalah terminal tipe C dan halte.

  Target kinerja indikator sebesar 95% dan terealisasi 95,35% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,37%.

Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan keselamatan lalu lintas terlaksana dengan baik. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengujian kendaraan bermotor, dimana persentase jumlah kendaraan lulus uji sebesar 98,36%. Dengan perhitungan sebagai berikut :
   - Kendaraan yang melakukan uji : 13.698 kendaraan
   - Kendaraan lulus uji : 13.474 kendaraan
   - Kendaraan tidak lulus uji : 224 kendaraan

$$Persentase\ kend.lulus\ uji = \frac{Jumlah\ \ kendaraan\ lulus\ uji}{Jumlah\ kendaraan\ melakukan\ uji} \times 100\%$$

$$= \frac{13474}{13698} \times 100 = \ 98{,}36\%$$

b. Pengamanan lalu lintas saat hari besar nasional, keagamaan dan hari-hari tertentu sejumlah 120 kegiatan;

c. Bimbingan teknis keselamatan angkutan dengan melibatkan instansi terkait yaitu Kepolisian Resort Nganjuk dan Jasa Raharja. Kegiatan terlaksana 12 kali dengan melibatkan total jumlah peserta 325 orang;

d. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebanyak 24 kali kegiatan;

e. Terlaksananya pembangunan perlengkapan jalan selama tahun 2022, yaitu :

1) Jumlah LPJU dibangun 146 unit
2) Jumlah Rambu dibangun 13 unit
3) Jumlah Halte dibangun 2 unit

Selain itu, factor eksternal juga berpengaruh terhadap menurunnya angka kecelakaan yang sangat signifikan, diantaranya adalah :

a. Pandemi Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan turunnya volume perjalanan masyarakat
b. Kebijakan pembelajaran sekolah secara terbatas juga sangat berpengaruh pada volume perjalanan masyarakat, mengingat sebagian besar pelaku perjalanan pada jam sibuk adalah pelajar.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pelayanan sektor transportasi meliputi pelayanan dalam memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan meliputi Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Terminal dan Halte, Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Pelayanan menjaga Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishub terhadap masyarakat :

1. Program Angkutan Sekolah Gratis merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar
2. Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas yang saat ini tersedia untuk 2 (dua) rute, yaitu rute dari Terminal MPU Sawahan – SLB KRIDA UTAMA 2 Loceret, dengan jumlah terlayani 32 siswa / Pergi – Pulang dan rute dari Kecubung – SLB Shanti Kosala Mastrip dengan jumlah terlayani 34 siswa / Pergi – Pulang.
3. Angkutan Mudik dan Balik Gratis untuk Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Bekerja di luar Kabupaten terutama di Kota Surabaya.
4. Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik untuk pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jasa angkutan.
5. Sosialisasi keselamatan lalu lintas anak usia dini dalam rangka memberikan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak.
6. Pengamanan lalu lintas dalam rangka hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk.
7. Terminal dan Halte merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Terminal merupakan simpul dari jaringan trayek angkutan umum. Keberadaan terminal sangat penting dalam melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum.
8. Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang.
9. Pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan Restribusi Parkir secara berlangganan dan pelayanan parkir masarakat di Tepi Jalan Umum

2.5 Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, tentunya diperlukan jalinan kerjasama dengan komunitas / instansi / pihak lintas sektoral. Tanpa adanya jalinan hubungan lintas sektoral, maka niscaya Dinas Perhubungan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok tersebut secara optimal.

Salah satu tugas yang di emban oleh Dinas Perhubungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas di jalan raya sehingga berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana amanat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mobilitas penduduk yang tinggi ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin naik mendorong adanya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian para pengendara yang tidak patuh dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. Kawasan tertib lalu lintas perlu diterapkan dan diperluas sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang kurang tertib, kurang disiplin, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka jalan, tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan parkir di sembarang jalan sehingga memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama atau mitra dalam memberikan pelayanan Dinas Perhubungan yang optimal, berikut daftar mitra Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan:

1) Polres Kabupaten Nganjuk

   Kerjasama antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas sehingga berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana amanat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat mewujudkan kawasan jalan raya yang aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

   Dinas Perhubungan juga memerlukan dukungan dari Polres Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban pengguna jalan dan kendaraan.

2) BANK JATIM

Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang. Rata-rata kendaraan dilayani sebanyak 40 unit perhari. Dalam melaksanakan pengujian di butuhkan pelayanan yang prima di tahun 2022 Dinas Perhubungan melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi e-Kir yaitu Pelaksanaan pembayaran non tunai uji kendaraan bermotor untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi pembayaran tanpa melalui perantara, dimana sistem pembayarannya bekerjasama dengan BANK JATIM melalui Virtual Accoun Bank Jatim pembayaran dilakukan secara CASH LESS untuk mencegah terjadinya pungutan liar,pembayaran dapat dilakukan melalui ATM,EDC, maupun mobile banking yang sudah terintegrasi dengan system informasi manajemen pendapatan asli daerah.

3) PLN

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang berdiri di seluruh jalan-jalan umum, baik jalan protokoler maupun jalan lintas. PJU berfungsi sebagai pelengkap jalan. Sebagai pelengkap, PJU dapat menambah keindahan, tetapi juga berfungsi sangat penting untuk menerangi jalan di malam hari karena membantu pengguna jalan melihat medan yang dilalui pada malam hari.

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan PJU, tagihan listrik terhadap pembayaran tagihan listrik PJU dibebankan penuh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

4) Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas (Angsasadis) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mendapatkan dukungan secara penuh dari Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memiliki kewenangan terhadap siswa-siswi sekolah yang menjadi bagian penumpang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

5) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa aset perlengkapan jalan, salah satunya rambu lalu lintas. Terdapat beberapa rambu lalu lintas yang berkurang fungsinya akibat pohon yang menghalangi keberadaan rambu tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memerlukan dukungan penuh dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga rambu lalu lintas dapat berfungsi kembali secara optimal.

2.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan

Dalam Melaksanakan peraturan bupati nganjuk nomor 02 tahun 2012 tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan mengadakan perjanjian kerjasama tentang fasilitas pelaksanaan pemungutan restribusi parkir secara berlangganan pada kantor bersama samsat kabupaten nganjuk dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan fasilitas pemungutan Restribusi Parkir secara berlangganan dengan memanfaatkan basis data (DataBase) yang ada pada kantor bersama SAMSAT, mengoptimalkan pendapatan daerah dari restribusi pelayanan parker di tepi jalan umum bagi pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penyediaan fasilitas parker di tepi jalan umum, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN

Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi tiga tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah tiga tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektivitas. Secara rinci permasalahan-permasalahan dibidang transportasi disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka Kecelakaan lalu lintas yang tinggi	Masih tingginya jumlah kecelakaan	Rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas
			Masih terdapat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik teknis jalan
			Masih terdapat perlintasan sebidang kereta api yang tidak berpalang pintu
			Kurangnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar keselamatan
2	Sarana dan Prasarana Transportasi darat	Prasarana Transportasi darat kurang memadai	Kurang Optimalnya terminal dan halte
		Sarana Transportasi darat kurang memadai	Kurang optimalnya angkutan umum
		Banyaknya Siswa sekolah di bawah umur Yang Mengendarai Sepeda Motor	Kurangnya Jumlah Angkutan Sekolah
3		Headway yang tinggi	Masih terjadi *mix traffic* dengan kendaraan lain

	Modal Share ke Angkutan Umum yang rendah	Tidak ada kepastian waktu	Jadwal dan titik henti tidak sesuai
		Mahal	Masih lebih murah menggunakan kendaraan pribadi
		Tidak terjangkau	Layanan angkutan umum yang belum menjangkau semua wilayah
		Jumlah armada yang masih minim	Perusahaan angkutan umum belum mampu menyesuaikan / memenuhi regulasi proses perizinan penyelenggaraan angkutan
		Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi	Belum ada regulasi yang membatasi kepemilikan kendaraan
		Tingginya mobilitas orang dengan kendaraan pribadi	Fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu, dan biaya operasional perjalanan yang lebih rendah

(1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalulintas.

Kurangnya ketertiban dan kedisiplinan pengguna jalan ditunjukkan oleh data jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah kendaraan berikut :

No	Korban Kecelakaan	Jumlah Korban			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meninggal dunia	237	185	198	201
2	Luka berat	28	14	13	23
3	Luka ringan	1511	1319	1336	1713
4	Kerugian Materi (Rp)	1.317.700.000	1.191.950.000	1.343.850.000	1.886.200.000
5	Jumlah Kejadian Kecelakaan	726	668	715	920

No	Uraian	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jalan Nasional	175	85	41	244
2	Jalan Provinsi	58	115	174	83
3	Jalan Kabupaten/Kota	493	468	500	593
4	Jalan Desa	0	0	0	0
Jumlah Kecelakaan		726	668	715	920

	Data Kendaraan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Roda 4	33.374	38.761	32.145	55.419
2	Roda 2	369.254	351.330	359.729	334.292
Jumlah Kendaraan		402.628	390.091	391.874	389.711

Data kecelakaan lalu lintas diperoleh dari Kepolisian Resort Nganjuk dan Data kendaraan di peroleh dari kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan, dari data tersebut bahwa dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pola aktivitas masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

(2) Masih banyak beroperasi kendaraan yang tidak laik jalan.

Laik jalan merupakan syarat wajib kendaraan untuk beroperasi dan melakukan perjalanan, terutama angkutan barang dan angkutan umum. Hasil kegiatan Penegakan Hukum Kelaikan Jalan masih ditemukan kendaraan tidak laik jalan yang beroperasi. Berdasarkan data dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR dan dinyatakan laik jalan adalah sebagai berikut:

Tahun 2014 : 89,30%
Tahun 2015 : 83,92%
Tahun 2016 : 86,87%
Tahun 2016 : 87,44%
Tahun 2018 : 90,61%
Tahun 2019 : 94,08%
Tahun 2020 : 98,35%
Tahun 2021 : 97,86%
Tahun 2022 : 98,36%

(3) Masih terdapat ruas jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan yang belum memenuhi standar keamanan.

Jumlah ruas jalan berdasarkan data Dinas PUPR sejumlah 470 ruas jalan, dari total jumlah ruas jalan tersebut 24,04% atau sejumlah 113 ruas jalan telah memenuhi standar perlengkapan jalan. Sedangkan ruas jalan yang belum memenuhi standar kelengkapan jalan sebesar 75,96%.

(4) Prasarana transportasi yang tersedia belum memadai.

Prasarana transportasi berupa terminal dan halte merupakan elemen penting dalam pelayanan transportasi, khususnya angkutan umum. Terminal yang merupakan simpul trayek angkutan umum berperan dalam melayani perpindahan angkutan umum dengan trayek berbeda. Sedangkan halte merupakan titik tunggu atau turun penumpang angkutan umum.Halte harus representatif sehingga penumpang merasa nyaman dalam memanfaatkan layanan angkutan umum. Kebutuhan terminal dan halte senantiasa dinamis seiring perubahan pola perjalanan masyarakat. Halte yang tersedia di Kabupaten Nganjuk belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan

angkutan umum. Masih terdapat lokasi tunggu angkutan umum, dengan jumlah permintaan *(demand)* yang tinggi, yang belum terfasilitasi halte. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Simpang 4 Adipura Loceret (2 buah)
b. Pasar Bagor (sisi utara dan selatan)
c. Simpang 4 Pehserut, Sukomoro
d. Simpang 4 Cangkringan (SMAN 1 Nganjuk)
e. Depan SMAN 3 Nganjuk
f. Depan SMAN 1 Kertosono
g. Depan Stasiun Baron
h. Depan SMPN 1 Sawahan
i. Depan MPP (Mol Pelayanan Publik)
j. Depan Kelurahan Mangundikaran
k. Simpang 3 Nglirang Pace

(5) Angkutan Sekolah Gratis Belum Melayani Semua Rute yang ada di wilayah Kab Nganjuk.

Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis yang saat ini berjalan dan baru mengakomodir 1 (satu) rute dengan titik pemberangkatan dari JOHO Pace dan Titik Akhir SMAN 3 Nganjuk Jumlah siswa yang terlayani sebanyak 90 anak / Pulang – Pergi. Rencana Program Pelaksanaan kegiatan untuk dapat memenuhi sampai 15 (Lima Belas) Rute Angkutan Sekolah Gratis di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah transportasi dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu diperlukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) tentang kondisi infrastruktur perhubungan di Kabupaten Nganjuk, yang sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi umum infrastruktur di Jawa Timur.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian rencana strategis yang pada hakikatnya merupakan kekuatan (*Strength*) dalam analisis SWOT dapat diidentifikasi antara lain:

b) Strength (Kekuatan)

1) Adanya struktur organisasi Dinas Kabupaten Nganjuk. (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk);

2) Adanya dukungan dan political will dari pemerintah;
3) Jumlah Pegawai yang memadai;
4) Adanya suasana kerja dan semangat kerja yang kondusif.

c) Weakness (Kelemahan)
1) Kualitas SDM relatif masih kurang untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2) Sarana dan prasarana belum memadai;
3) Masih terbatasnya kesempatan personil untuk mengikuti diklat teknis fungsional;
4) Data dan informasi yang tersedia belum memadai.

d) Opportunity (Peluang)
1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup pesat;
2) Kebutuhan pelayanan masyarakat dibidang perhubungan cukup tinggi;
3) Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor;
4) Meningkatnya partisipasi dan respon yang positif dari masyarakat;
5) Adanya sistem komputerisasi informasi yang berbasis jaringan.

e) Threats (Tantangan)
1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas;
2) Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat sulit untuk diturunkan;
3) Masih lemahnya penegakan hukum dibidang perhubungan;
4) Dinamika sosial politik yang fluktuatif;
5) Masih kurang efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan informasi yang tersedia.

Pada jangka menengah Dinas Perhubungan harus mampu menjadi pionir kualitas pelayanan terhadap masyarakat karena pada hakekatnya sebelum memenuhi kebutuhan pokok maka yang harus dipenuhi adalah kebutuhan transportasi. Adapun fokus pelayanan Dinas Perhubungan meliputi :

1) Pengujian kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2023 layanan uji Kir telah dilengkapi dengan aplikasi sehingga wajib uji dapat mendaftar via online dan melakukan pembayaran secara non tunai
2) Bimbingan teknis keselamatan angkutan orang dan barang
3) Pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
4) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas
5) Pengamanan lalu lintas pada hari besar nasional, keagamaan dan hari-hari tertentu
6) Penyediaan perlengkapan jalan
7) Pemeliharaan perlengkapan jalan sehingga dapat berfungsi sesuai standar
8) Pembangunan halte pada lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum
9) Pemeliharaan terminal dan halte sehingga berfungsi sebagaimana mestinya

3.2 ISU STRATEGIS

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2020 - 2024, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat

dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Visi : "Kementerian Perhubungan Yang Berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Guna Mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mencapai Visi, Kemenhub menetapkan 5 (lima) **Misi** sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan strategis Kemenhub Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Kementerian/Lembaga pengampu urusan Perhubungan yang relevan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk adalah Kementerian Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat menyampaikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk diperlukan adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
   Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya Kinerja Pelayana Transportasi
   Untuk mewujudkan tujuan :
   1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyakarat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
   2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitasi Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;

3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan : meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Nganjuk, agar ruang tersebut sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam perencanaan sektor perhubungan, aspek tata ruang menjadi salah satu fokus perhatian. Lokasi prasarana transportasi seperti Terminal Tipe C, halte dan perlengkapan jalan difokuskan pada wilayah penunjang perekonomian sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW diantaranya kawasan wisata, kawasan industri dan perdagangan.

Demikian juga tentang isu lingkungan hidup saat ini menjadi bagian isu yang tidak terpisahkan dengan sektor transportasi. Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perhubungan berkontribusi pada salah satu tujuan yaitu tujuan 11 Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan terhadap KLHS Kabupaten Nganjuk adalah persentase pengguna moda transportasi umum. Berdasarkan data diperoleh capaian yang masih rendah yaitu 9%, sehingga diperlukan langkah untuk meningkatkan nilai capaian tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan kualitas prasarana transportasi diantaranya meningkatkan kualitas Terminal Tipe C dan pembangunan Halte. Diharapkan dengan semakin optimalnya layanan Terminal Tipe C dan semakin terpenuhinya kebutuhan halte maka akan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum. Untuk menjaga kualitas lingkungan, peran Dinas Perhubungan adalah dengan menjaga kualitas emisi gas buang kendaraan agar tetap memenuhi standar lingkungan melalui uji emisi kendaraan pada saat uji berkala kendaraan (uji KIR).

Berdasarkan uraian gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, serta permasalahan yang dihadapi selanjutnya dipilihlah isu-isu strategis Dinas Perhubungan di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh :
    1) Rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas
    2) Masih terdapat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik teknis jalan
    3) Masih terdapat perlintasan sebidang kereta api yang tidak berpalang pintu
    4) Kurangnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar keselamatan
    5) Peningkatan volume kendaraan pribadi
b. Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat kurang memadai sehingga menyebabkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan secara maksimal.
c. Belum optimalnya pelayanan angkutan sekolah
d. Modal Share ke Angkutan Umum yang rendah, minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum masih kurang, sehingga secara otomatis volume kendaraan pribadi terus meningkat.

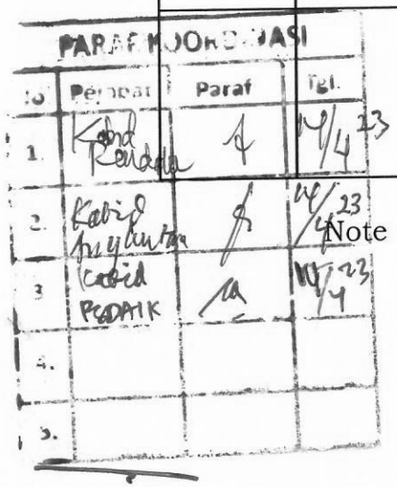
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menunjukkan tujuan strategis Dinas Perhubungan dalam 3 tahun kedepan. Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada berbagai macam persoalan , khususnya permasalahan di sektor perhubungan antara lain masih tingginya jumlah kecelakaan akibat kurang tertib dan disiplinnya pengguna jalan,kondisi kendaraan tidak laik jalan, kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta minimnya kesadaran masyarakat untuk dapat beralih moda transportasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Dari berbagai macam persoalan di sektor perhubungan maka tujuan yang akan di capai adalah "*Meningkatnya keselamatan transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan*". Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun sasaran kinerja yaitu *Meningkatkan keselamatan transportasi.* Indikator kesuksesan capaian tujuan tersebut akan ditunjukkan dalam *Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan,* Data kecelakan Di Kabupaten Nganjuk Diperoleh Dari Polres Nganjuk sedangkan Data Kendaraan Diperoleh Dari kendaraan yang Membayar Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan. Dari indikator tersebut dapat digambarkan seberapa besar peningkatan keselamatan pengguna jalan telah tercapai, dengan peningkatan keselamatan diharapkan penyelenggaraan transportasi daerah dapat berjalan dengan tertib,lancer,selamat,aman dan berkelanjutan yang merupakan bentuk pelayanan Dinas Perhubungan kepada masyarakat.

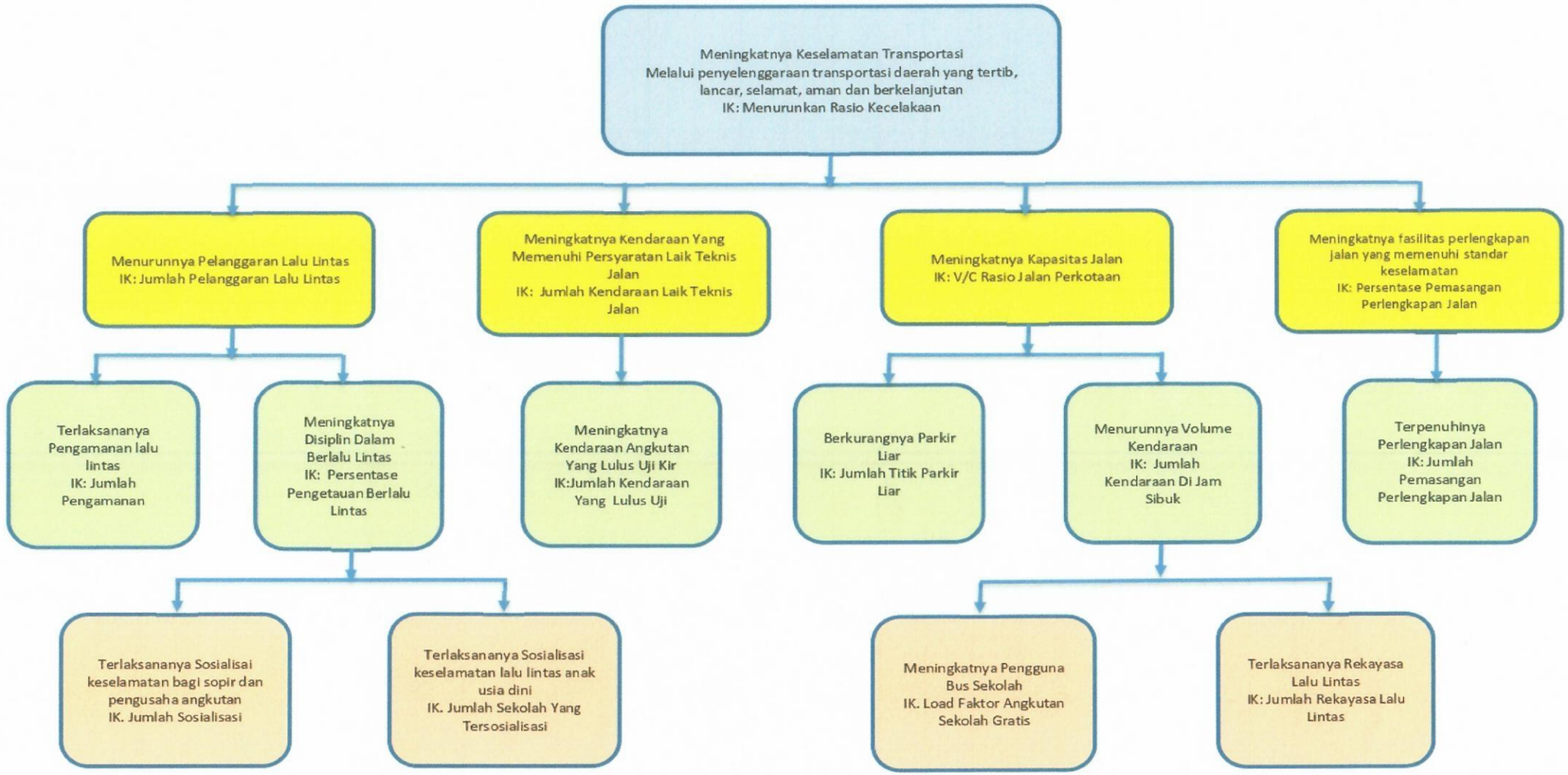
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal restra (capaian Tahun 2022)	Target kinerja sasaran pada tahun ke-		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan		Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Rasio	23,61	22,5	22	21,5
		Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Rasio	23,61	22,5	22	21,5



Note : Jumlah Kecelakan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Sebanyak 920 Laka Lantas
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Sebanyak 389.711 Kendaraan

POHON KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK



CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Unit Pelaksana
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokoumen Perencanaan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT
								Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronok Pada SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
								Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio jalan perkotaan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Yang Disusun	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	BIDANG LALU LINTAS
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

							Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
								Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	
								Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	
								Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
								Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Permohonan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	

						(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Andalalin yang Ditindaklanjuti	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	
					Persentase pemasangan perlengkapan jalan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
					Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI
								Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	

						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
								Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026

Strategi dan kebijakan yang dibuat mengarah pada pembangunan perhubungan yang lebih berkualitas yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran-sasaran pada masing-masing program. Strategi merupakan metode untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kebijakan-kebijakan sehingga strategi yang telah dicanangkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan diambil Dinas Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.		
Sasaran RPD:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi.		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatknya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	1. Penguatan Kelembagaan	Penataan Sumber Daya Manusia
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		2. Sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas	Sosialiasi/penyuluhan keselamatan lalu lintas
			Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan transportasi
		3. Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	Pembangunan palang pintu perlintasan sebidang kereta api
			Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan
			Meningkatkan pelaksanaan

			pengujian kendaraan bermotor
		4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan	Melaksanakan pengaturan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan
			Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Meningkatkan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
		5.Pengembangan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Melaksanakan kajian pengembangan angkutan umum
			Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum
			Mengintegrasikan sistem angkutan umum
			Menyediakan pelayanan angkutan sekolah gratis yang menjangkau semua wilayah kabupaten Nganjuk.
			Mewujudkan pelaksanaan angkutan perintis dan angkutan karyawan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator,target, dan pendanaan indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel VI.1. Diantara program dan kegiatan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk melakukan inovasi demi meningkatkan pelayanan bidang transportasi kepada masyarakat. Program inovatif yang diantaranya dimulai tahun 2024 dan akan dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Bidang	Kegiatan	Sasaran	Output
1	2024-2026	Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan Pelaksanaan pembayaran non tunai	Wajib uji kendaraan bermotor	Mempermudah masyarakat melakukan transaksi pembayaran tanpa melalui perantara
2	2024-2026	Angkutan dan Transportasi	*Roadmapping* jaringan trayek Angkutan Pedesaan	Masyarakat	Tersusunnya perencanaan Angkutan Pedesaan di wilayah Kabupaten Nganjuk
4	2024-2026	Angkutan dan Transportasi	*Roadmapping* angkutan karyawan di Kab. Nganjuk	Karyawan perusahaan di Kab. Nganjuk	Tersusunnya perencanaan angkutan karyawan di Kab. Nganjuk
3	2024-2026	Angkutan dan Transportasi	*Roadmapping* Angkutan wisata di wilayah Kabupaten Nganjuk	Masyarakat	Tersusunnya perencanaan Angkutan wisata di wilayah Kabupaten Nganjuk
4	2024-2026	Lalu Lintas	Database Kinerja Jalan	Kab Nganjuk	Tersusunnya database kinerja jalan di ruas jalan kewenangan kab.nganjuk
4	2024-2026	Teknik Sarana dan Prasarana	Database Perlengkapan Jalan	Kab Nganjuk	Tersusunnya database perlengkapan jalan di ruas jalan kewenangan kab.nganjuk

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 2024		Tahun 2 2025		Tahun 3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
			15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				37.432.654.999		38.141.308.099		38.864.134.261		114.438.097.359		
Meningkatkan Keselamatan Transportasi melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	84,20 Nilai	91 Nilai	27.594.995.799	91,5 Nilai	27.814.995.799	92 Nilai	28.120.821.961	92 NIlai	83.530.813.559		
			15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	8 dokumen	30.000.000	8 dokumen	30.000.000	9 dokumen	30.000.000	25 dokumen	90.000.000	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokoumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	7 dokumen	30.000.000		
			2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	12 Laporan	30.000.000		
			2 15 01 2.01 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	6 Laporan	30.000.000		
			2 15 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	8.043.837.594	12 Dokumen	8.043.837.594	12 Dokumen	8.043.837.594	36 Dokumen	24.131.512.782	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang /Bulan	66 Orang /Bulan	8.033.837.594	66 Orang /Bulan	8.033.837.594	66 Orang /Bulan	8.033.837.594	66 Orang /Bulan	24.101.512.782		
			2 15 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	15.000.000		
			2 15 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000		
			2 15 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	135.000.000	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	3 Paket	45.000.000		
			2 15 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	30.000.000	3 orang	30.000.000	3 orang	30.000.000	9 orang	90.000.000		
			2 15 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	890.000.000	12 Dokumen	890.000.000	12 Dokumen	890.000.000	36 Dokumen	2.670.000.000	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	12 Paket	120.000.000		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendala		14/4/23
2.	Kabid Angkutan		14/4/23
3	Kabid PKDPNK		14/4/23
4			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 2024		Tahun 2 2025		Tahun 3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2 15 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	140.000.000	4 Paket	140.000.000	4 Paket	140.000.000	12 Paket	420.000.000		
			2 15 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	380.000.000	4 Paket	380.000.000	4 Paket	380.000.000	12 Paket	1.140.000.000		
			2 15 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	9 dokumen	15.000.000		
			2 15 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.000.000	4 Paket	13.000.000	4 Paket	13.000.000	12 Paket	39.000.000		
			2 15 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	12 Laporan	21.000.000		
			2 15 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	12 Laporan	750.000.000		
			2 15 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 dokumen	5.000.000	100 dokumen	5.000.000	100 dokumen	5.000.000	300 dokumen	15.000.000		
			2 15 01 2,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronok Pada SKPD		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	3 dokumen	150.000.000		
			2 15 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan	47 unit	20 unit	1.360.000.000	24 unit	1.430.000.000	24 unit	1.510.000.000	68 unit	4.300.000.000	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	600.000.000	1 unit	700.000.000	1 unit	700.000.000	3 unit	2.000.000.000		
			2 15 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	6 unit	600.000.000	5 unit	520.000.000	5 unit	600.000.000	16 unit	1.720.000.000		
			2 15 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	9 unit	.30.000.000		
			2 15 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 unit	10 unit	150.000.000	15 unit	200.000.000	15 unit	200.000.000	40 unit	550.000.000		
			2 15 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Laporan	36 Laporan	16.141.158.205	36 Laporan	16.241.158.205	36 Laporan	16.466.984.367	108 Laporan	48.849.300.777	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	4 Laporan	2.400.000	12 Laporan	7.200.000		
			2 15 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.438.758.205	12 Laporan	15.538.758.205	12 Laporan	15.764.584.367	36 Laporan	46.742.100.777		
			2 15 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	700.000.000	36 Laporan	2.100.000.000		
			2 15 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara	115 Unit	117 Unit	1.085.000.000	117 Unit	1.135.000.000	117 Unit	1.135.000.000	117 Unit	3.355.000.000	Sekretariat	Kab. Nganjuk
			2 15 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	300.000.000		

PARAF KOORDINASI

No	Perangkat	Paraf
1.	Kabid Rendalu	1
2.	Kabid pengelolaan	
3	Kabid PBBAK	
4.		
5.		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 2024		Tahun 2 2025		Tahun 3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2 15 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	700.000.000	23 Unit	750.000.000	23 Unit	750.000.000	23 Unit	2.200.000.000		
			2 15 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 Unit	10.000.000	50 Unit	10.000.000	50 Unit	10.000.000	150 Unit	30.000.000		
			2 15 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	60.000.000	90 Unit	60.000.000	90 Unit	60.000.000	90 Unit	180.000.000		
			2 15 01 2,09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	15.000.000		
			2 15 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	210.000.000	2 Unit	210.000.000	2 Unit	210.000.000	2 Unit	630.000.000		
			2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 Nilai	0,3 Nilai	9.837.659.200	0,3 Nilai	10.326.312.300	0,3 Nilai	10.743.312.300	0,3 Nilai	30.907.283.800		
					Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	98,36%	99,00%		99,00%		99,00%		99,00%			
					Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	100%	100%		100%		100%		100%			
					Persentase pemasangan perlengkapan jalan	81,68%	86,50%		89,10%		91,80%		91,80%			
			2 15 02 2,01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Yang Disusun		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	300.000.000	Bidang Lalu-lintas	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2,01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	300.000.000		
			2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara	1875 unit	1872 unit	2.405.000.000	1877 Unit	2.555.000.000	1882unit	2.805.000.000	5611 unit	7.765.000.000	BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	2 unit	2 unit	105.000.000	2 unit	105.000.000	2 unit	105.000.000	6 unit	315.000.000		
			2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	53 unit	40 unit	900.000.000	45 Unit	1.000.000.000	50 unit	1.200.000.000	135 unit	3.100.000.000		
			2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		10 unit	50.000.000	8 unit	50.000.000	8 unit	50.000.000	10 unit	150.000.000		
			2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1820 unit	1820 unit	1.350.000.000	1820 unit	1.400.000.000	1820 unit	1.450.000.000	5460 unit	4.200.000.000		
			2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	5 unit	6 unit	500.000.000	6 unit	600.000.000	6 unit	650.000.000	6 unit	1.750.000.000	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1 unit	100.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	500.000.000		
			2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	5 unit	400.000.000	5 unit	400.000.000	5 unit	450.000.000	5 unit	1.250.000.000		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendal		14/4/23
2.	Kabid Angkutan		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	3.097.659.200	12 Laporan	3.097.659.200	13 Laporan	3.197.659.200	37 Laporan	9.392.977.600	Bidang Lalu-lintas	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
			2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	3.097.659.200	12 Laporan	3.097.659.200	12 Laporan	3.097.659.200	36 Laporan	9.292.977.600		
			2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	7000 UNIT	7000 UNIT	640.000.000	7500 UNIT	640.000.000	8000 UNIT	640.000.000	22.500 UNIT	1.920.000.000	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	7 Unit	270.000.000	7 Unit	270.000.000	7 Unit	270.000.000	21 Unit	810.000.000		
			2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 DOKUMEN	7000 DOKUMEN	150.000.000	7500 DOKUMEN	150.000.000	8000 DOKUMEN	150.000.000	22500 DOKUMEN	450.000.000		
			2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 UNIT	10 UNIT	220.000.000	10 UNIT	220.000.000	10 UNIT	220.000.000	10 UNIT	660.000.000		
			2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	18 Laporan	22 Laporan	1.775.000.000	22 Laporan	1.975.000.000	22 Laporan	1.975.000.000	66 Laporan	5.725.000.000	Bidang Lalu-lintas	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	6 Laporan	300.000.000		
			2 15 02 2.06 02	Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan		16 Unit	1.400.000.000	18 Unit	1.600.000.000	20 Unit	1.600.000.000	20 Unit	4.600.000.000		
			2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	90.000.000		
			2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	230.000.000	36 Laporan	690.000.000		
			2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	12 laporan	45.000.000		
			2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti	4Laporan	8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	50.000.000	24 Laporan	150.000.000	Bidang Lalu-lintas	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Randalla		14/4/23
2.	Kabid Angkutan		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	12 Laporan	90.000.000		
			2 15 02 2.07 04	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	12 Laporan	60.000.000		
			2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	6 Laporan	16 Laporan	480.000.000	16 Laporan	500.000.000	16 Laporan	510.000.000	48 Laporan	1.490.000.000	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	12 Laporan	150.000.000		
			2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	12 Laporan	430.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	460.000.000	36 Laporan	1.340.000.000		
			2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	15 Unit	790.000.000	15 Unit	808.653.100	15 Unit	815.653.100	45 Unit	2.414.306.200	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI	Kab. Nganjuk
			2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	15 Unit	735.000.000	15 Unit	753.653.100	15 Unit	760.653.100	45 Unit	2.249.306.200		
			2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	3 Laporan	165.000.000		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pondalin		14/4 23
2.	Kabid Angkutan		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.1 Dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.2.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja awal Renstra (capaian Tahun 2022)	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun-1 2024	Tahun-2 2025	Tahun-3 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	$\frac{Jumlah\ Kecelakaan\ Lalu\ lintas}{Jumlah\ Kendaraan} x\ 10.000$	23,61	22,5	22	21,5	Rasio Kecelakaan sebesar 21,5

Note : Jumlah Kecelakan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Sebanyak 920 Laka Lantas
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Sebanyak 389.711 Kendaraan

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001